



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINT DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua di masa Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2019–2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019–2024).

LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2022 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP DPMPTSP NAKER Kab. Sampang tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta serta pertanggung jawaban atas kinerja dinas DPMPTSP NAKER, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP NAKER untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang terdiri atas pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek perencanaan dan perjanjian kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja DPMPTSP NAKER pada tahun 2021, sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran

capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator Kinerja Utama DPMPTSP NAKER tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 pada DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang telah membuahkan hasil pembangunan. Dari dua Indikator Kinerja Utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi, kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan, keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mengandung tercapainya pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP DPMPTSP NAKER tahun 2022 ini, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sampang, Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

Ir. MAJID SYAMRONI, M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP. 19670324 199710 1 001

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. UMUM.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. TUGAS DAN FUNGSI DPMPSTP.....	4
D. ISU STRATEGIS.....	19
E. CASCADING KINERJA.....	20
F. PETA PROSES BISNIS	24
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	28
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
a. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	32
b. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV : PENUTUP.....	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Seperti diketahui, RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu itu kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Evaluasi 1 (satu) tahun atau pada tahun 2022 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisa lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi dari tantangan dan peluang, serta bagaimana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga Penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau DPRD.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dari uraian diatas maka wajar apabila visi DPMPTSP NAKER yaitu Pelayanan Prima dalam Menjamin Kepuasan dan Usaha Bersama berarti memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Sampang dengan penerapan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang konsekuen sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dan merasakan nyaman dalam berusaha. Adanya kepuasan dalam kinerja pelayanan aparatur pemerintah akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan serta kepemilikan terhadap perizinan dan investasi yang merupakan faktor dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana pada tabel dan penjelasan dibawah ini.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang

TAHUN 2022

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP NAKER
Kabupaten Sampang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target						Realisasi		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	438.667,875	464.667.875	299.943.870	303.257,158	306.687,934	310.223,389	297.115.146.000	297.513.257.988	329.378.337.166
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,16	93,26	93,24
3	Meningkatnya partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	94,83 %	94,98 %	75 %	77,23 %	95,39 %	95,52 %	56,91 %	75,9 %	476,54 %

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang tahun 2022 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan (2019-2024).

Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2022 dengan alat ukur Indikator Kinerja Program (*Outcome*) adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK
2. Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi
3. Angka Sengketa pengusaha pekerja pertahun
4. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi
5. Jumlah Potensi Investasi (Jenis)
6. Nilai Investor (PMDN / PMA)

7. Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu (%)
8. Jumlah LKPM pertahun (Jenis)
9. Jumlah Investasi PMDN (Juta Rp.)

**BAB
I**

PENDAHULUAN

A. UMUM

Berlakunya Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggarannya menekankan pada prinsip–prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Keputusan Pemberlakuan Otonomi Daerah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002, telah membawa implikasi yang luas dan serius, oleh karenanya tidak sedikit masalah tantangan dan kendala yang sedang di hadapi oleh daerah. Otonomi daerah merupakan fenomena–fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi dan globalisasi yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintah perlu di penuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, personalisme serta **Akuntabilitas**. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kabupaten Sampang. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategis organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat, sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di pemerintah Kabupaten Sampang yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Penilaian atas keberhasilan/ kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin di capai/ diwujudkan dalam kurun waktu 1 atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sampang.

B. STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP NAKER

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, Organisasi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Terdiri Dari 1 Sekretaris, Sub Bagian Umum, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, 2 Koordinator dan Kelompok Jabatan, dan Bidang Tenaga Kerja. Berikut merupakan Bagan

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

**Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG



C. TUGAS DAN FUNGSI DPMPSTP NAKER

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah maka dibentuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Fungsi dan uraian tugas masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut :

a. **Kepala Dinas**

b. **Sekretariat,**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (nonyudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (*maintenance*);

m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

d. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;

d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, perlengkapan kantor dan pengamanan;

f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang undangan;

h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (*maintenance*); dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

e. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat , Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Trasmigrasi;

b. melaksanakan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten, menerbitkan Izin lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, pengelolaan Informasi Pasar, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penerbitan serta

c. pembinaan penempatan tenaga kerja umum, tenaga kerja muda penyandang cacat dan lanjut usia, melaksanakan koordinasi dan kerjasama

dengan para pengusaha, lembaga dan instansi dalam pertukaran informasi guna merealisasikan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;

- d. melaksanakan pendaftaran dan seleksi kepada calon transmigrasi, pemantapan, pelatihan dan bimbingan mental kepada calon transmigrasi, pelaksanaan pemindahan penduduk, pembinaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang penempatan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi; dan
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, menganalisis data informasi kinerja serta mengadakan pemantauan dan evaluasi kinerja program kegiatan serta serapan anggaran bidang.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud :
 1. Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 2. Kepala Bidang dan Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kepala Bidang dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang Berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan. Tim teknis sebagaimana dimaksud beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi terhitung sejak dilakukan pelantikan.

D. ISU STRATEGIS

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*) dan factor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*treats*).

Identifikasi Faktor Internal yaitu:

Kekuatan (*Strength*):

- a. Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sampang
- b. Meningkatkan para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan adanya job fair
- c. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana
- e. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani perizinan dan non perizinan
- f. Peta potensi investasi
- g. Kewenangan perizinan terpadu melalui PTSP

Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Kurangnya pengetahuan pencari kerja
- b. Keterbatasan akses informasi dan kompetensi sumber daya manusia terkait sektor logistik
- c. Kurang optimal pengawasan kegiatan penanaman modal
- d. Belum tersedianya potensi area logistic sebagai destinasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*):

- a. Penerapan pelatihan kerjadi BLK
- b. Penerapan informasi lowongan pekerjaan melalui media social
- c. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Pengembangan industry kreatif berbasis prroduk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal

Ancaman (*Treats*):

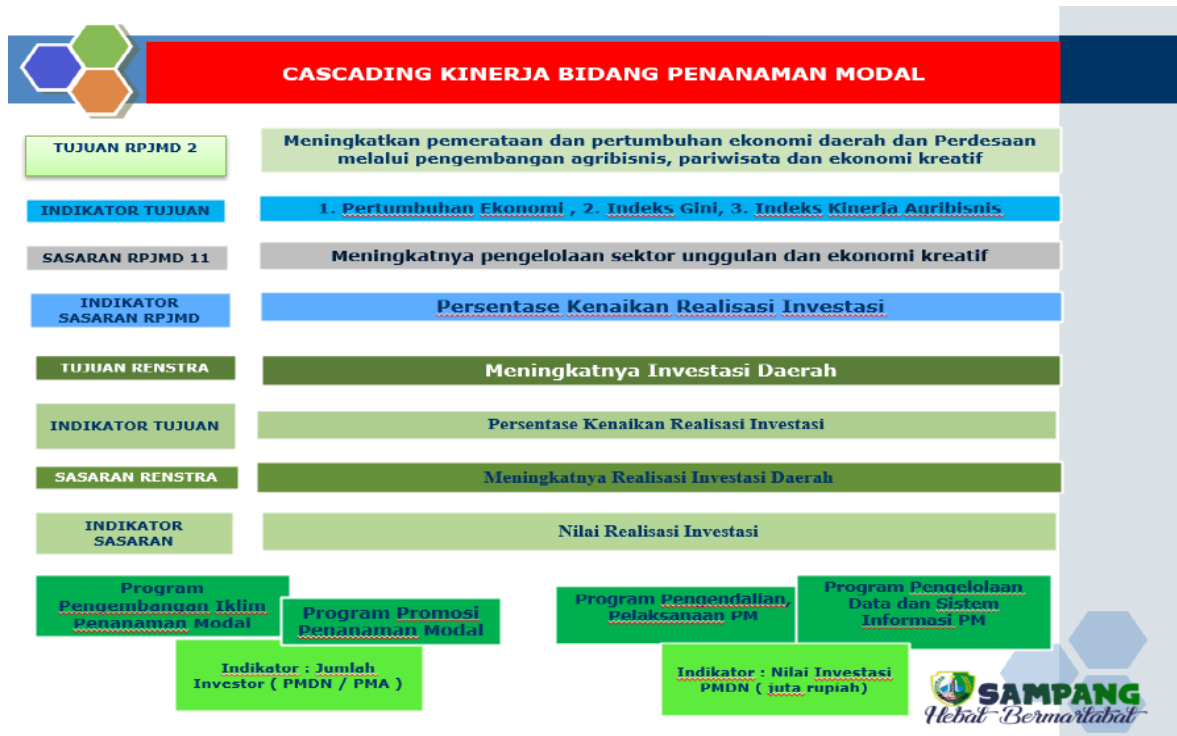
- a. Akses social media yang kurang dipahami oleh masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang sudah upload oleh website BLK sampang
- b. Akses infrastruktur pendukung kegiatan logistik
- c. Adanya pengaduan masalah perizinan
- d. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perizinan online
- e. Ketidaksesuaian kepemilikan perizinan

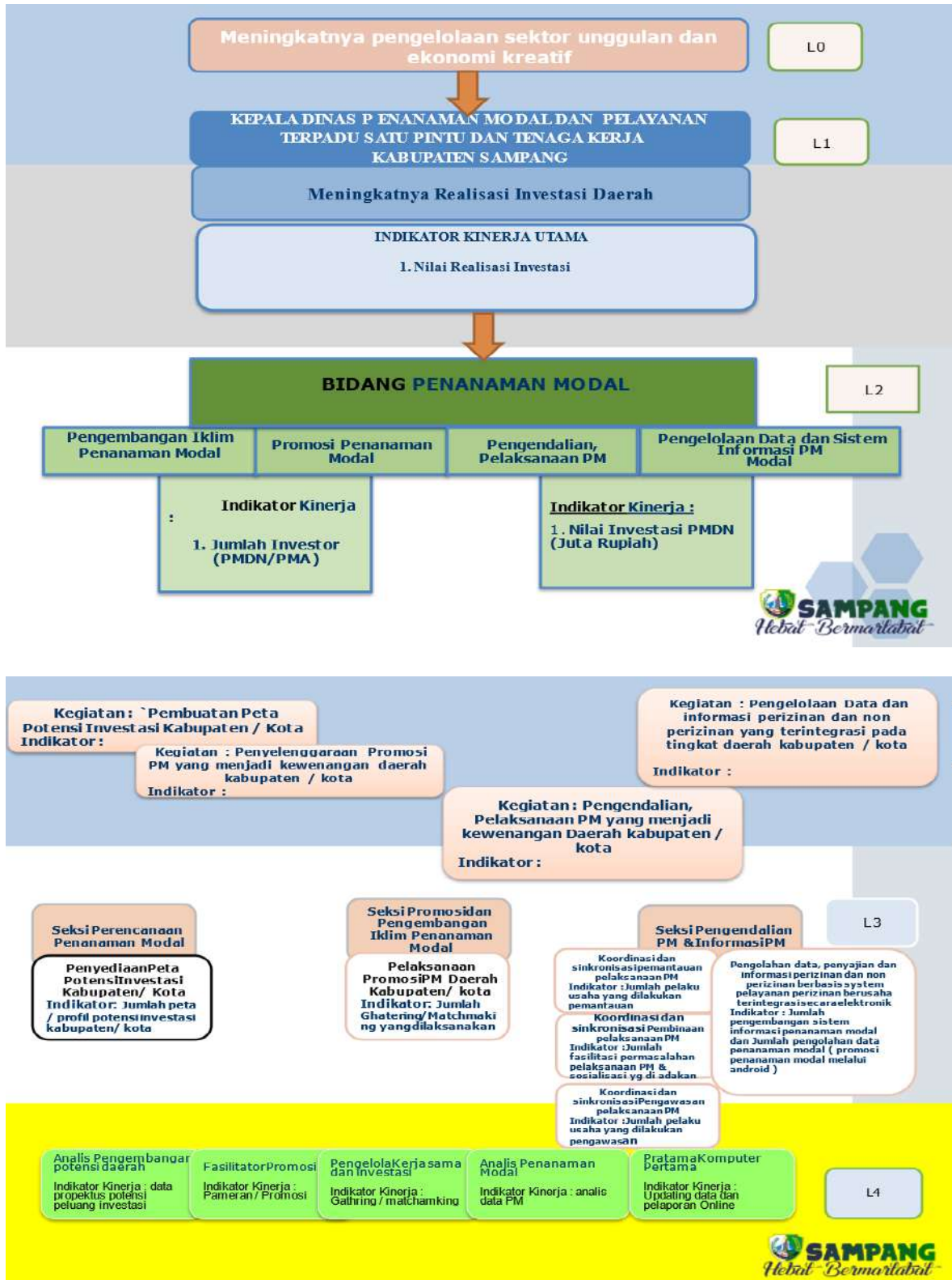
Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelatihan bagi pencari kerja di BLK
2. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluas – luasnya kepada masyarakat terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sampang

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi
6. Penataan Kembali Sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
7. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dias / instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertical. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

E. CASCADING KINERJA DPMPSTP NAKER (Keterhubungan Dengan RPJMD)

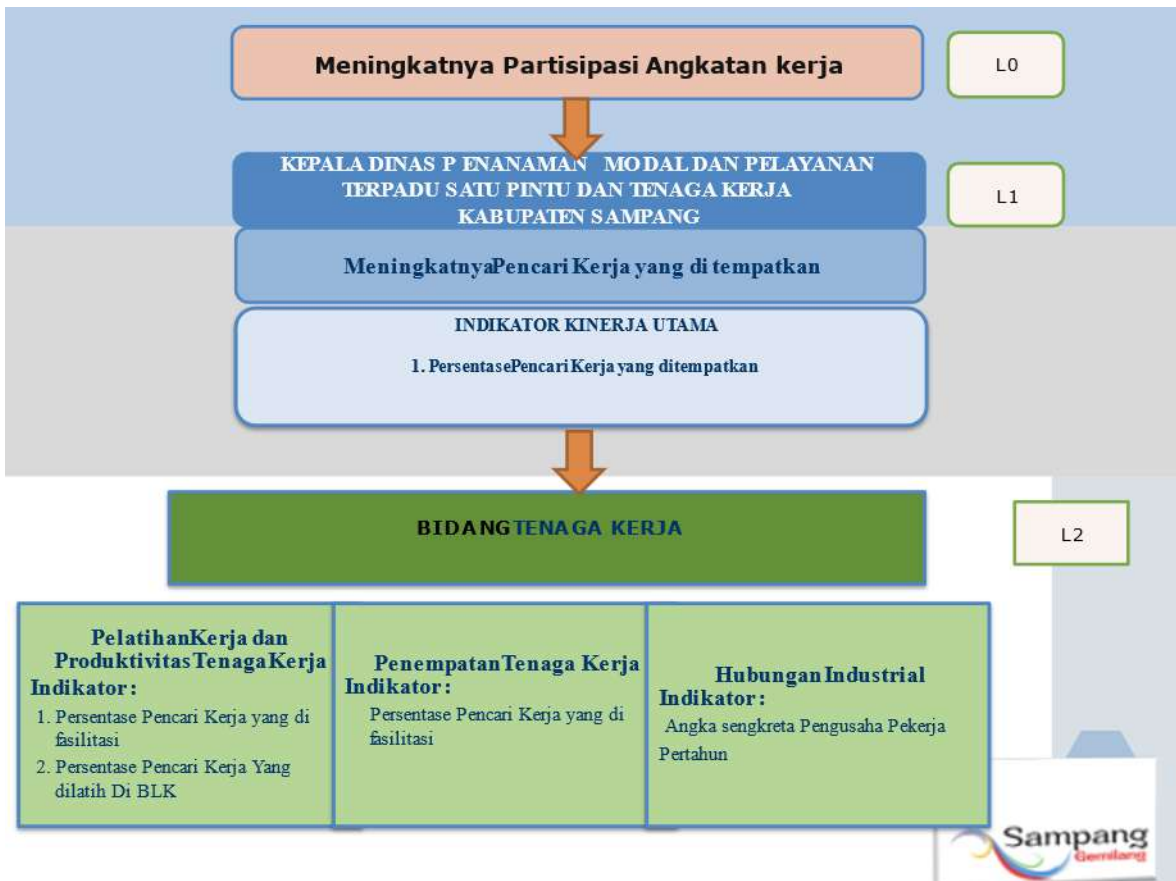
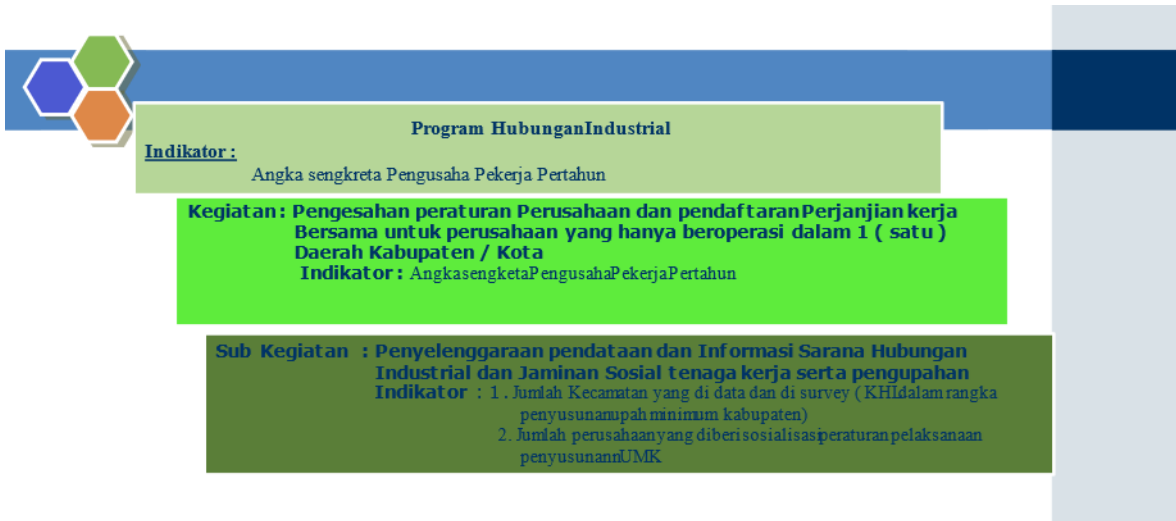




CASCADING BIDANG TENAGA KERJA

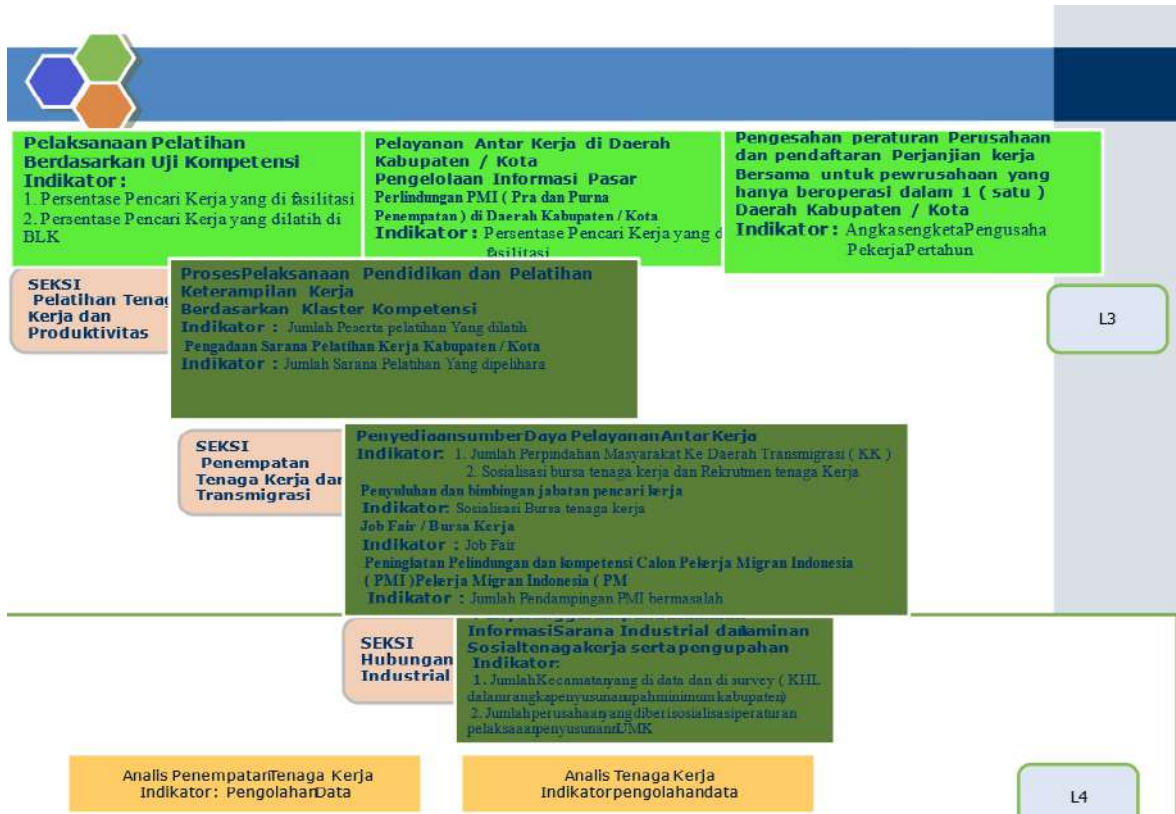
TUJUAN RPJMD 2	Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
INDIKATOR TUJUAN	1. Pertumbuhan Ekonomi, 2. Indeks Gini, 3. Indeks Kinerja Agribisnis
SASARAN RPJMD 8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan kerja
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya partisipasi Angkatan kerja
INDIKATOR TUJUAN	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Pencari Kerja yang di tempatkan
INDIKATOR SASARAN	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator : 1. Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi 2. Persentase Pencari Kerja Yang dilatih Di BLK
Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Uji Kompetensi Indikator : 1. Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi 2. Persentase Pencari Kerja Yang dilatih Di BLK
Sub Kegiatan : 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi Indikator : Jumlah Peserta pelatihan Yang dilatih 2. Pngadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota Indikator : Jumlah Sarana Pelatihan Yang dipelihara
Program Penempatan Tenaga Kerja
Indikator : Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi
Kegiatan : 1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar 3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota Indikator : 1. Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi
Sub Kegiatan : 1.1 Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja Indikator : 1. Jumlah Perpindahan Masyarakat Ke Daerah Transmigrasi (KK) 2. Sosialisasi bursa tenaga kerja dan Rekrutmen tenaga Kerja 1.2. Penyuluhan dan bimbingan jabatan pencari kerja Indikator : Sosialisasi Bursa tenaga kerja 2.1. Job Fair / Bursa Kerja Indikator : Job Fair 3.1. Peningkatan Pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indikator : Jumlah Pendampingan PMI bermasalah

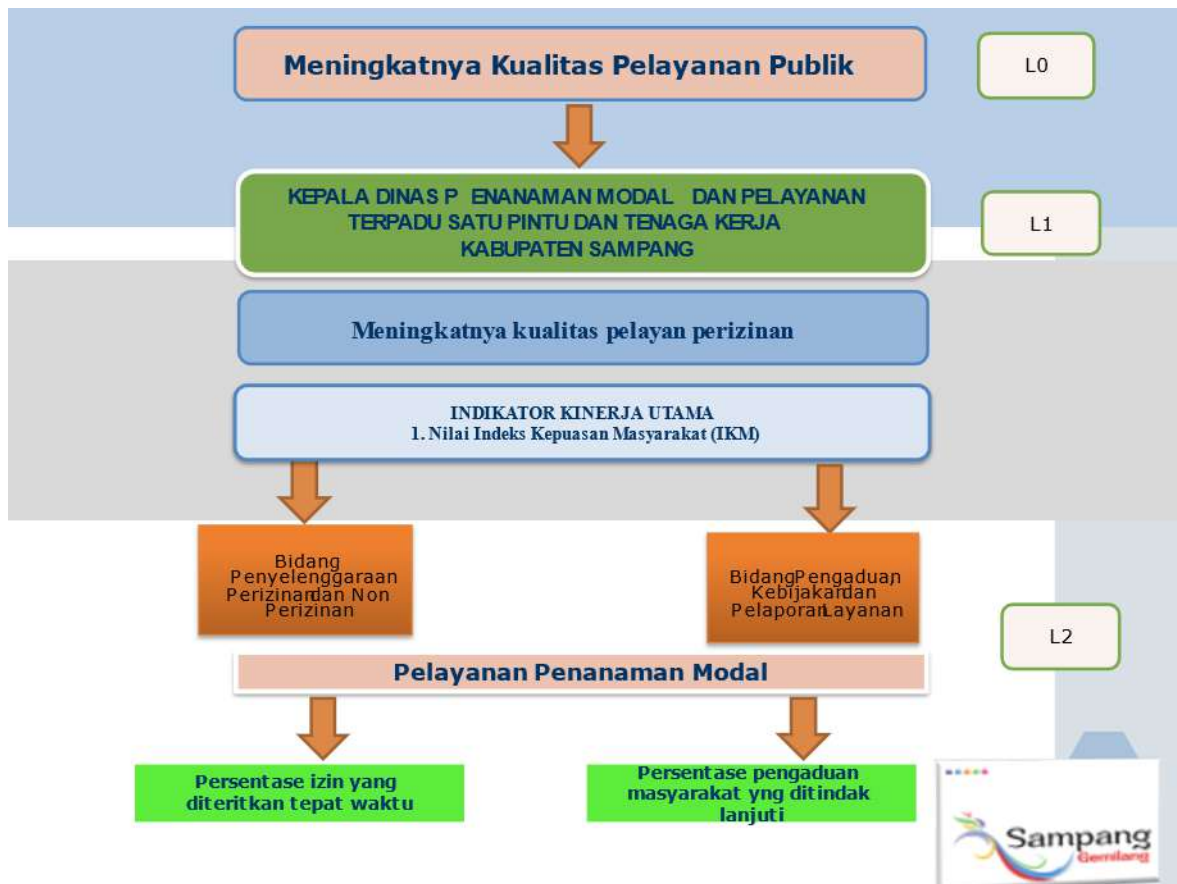


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | TAHUN 2022
(LKjIP)

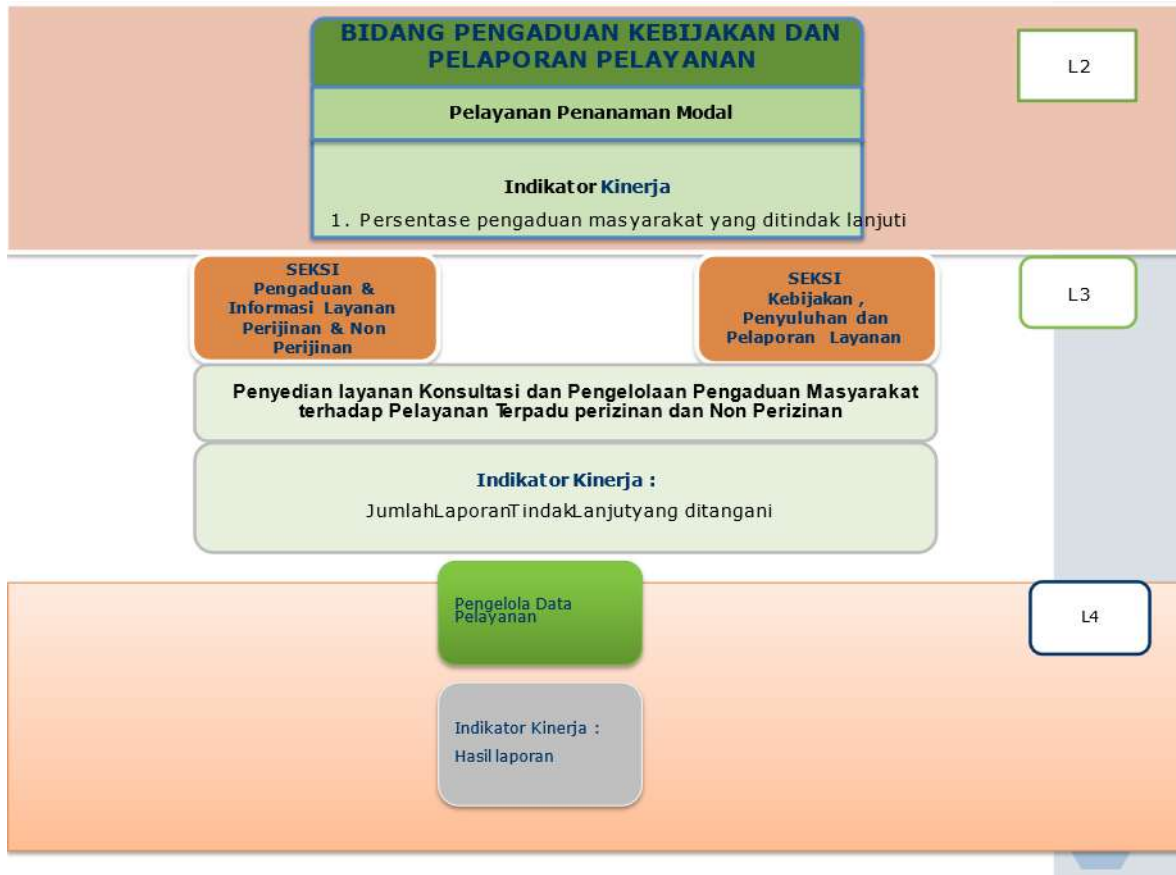
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang



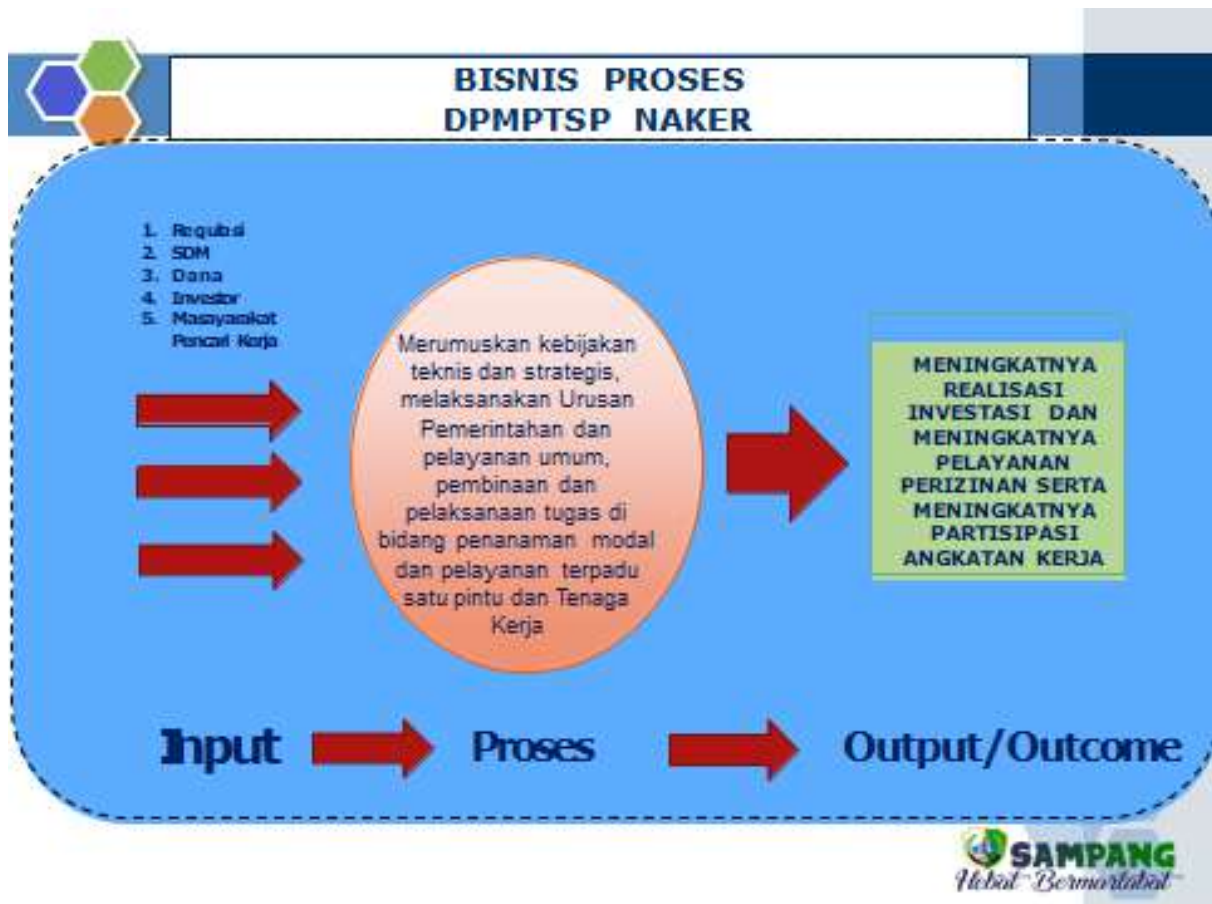








F. PETA PROSES BISNIS



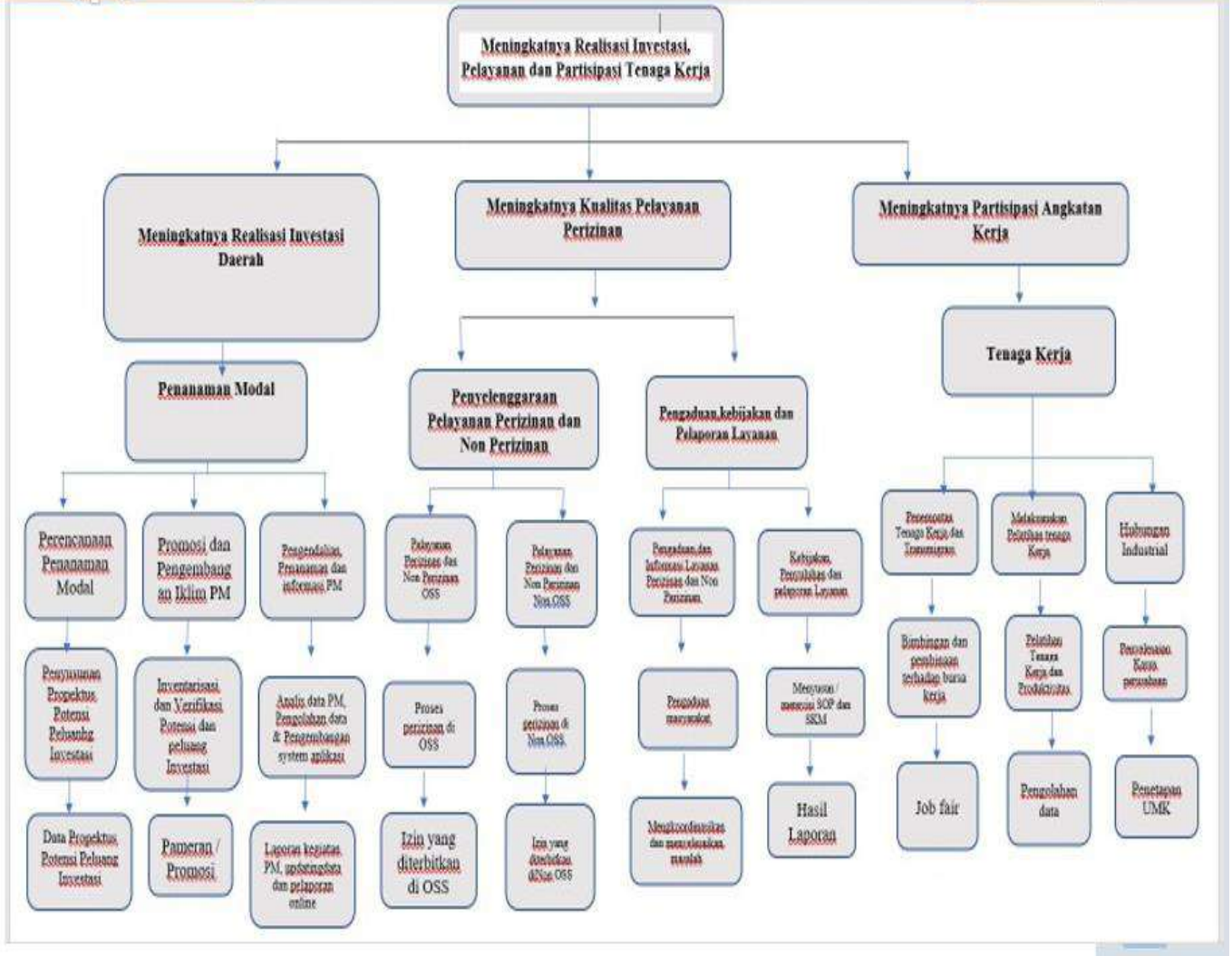
Proses Bisnis Inti DPMPTSP NAKER:

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
3. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

G. PROSES BISNIS INTI



INTI PROSES BISNIS





**PROSES BISNIS INTI
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
DAN TENAGA KERJA**

1

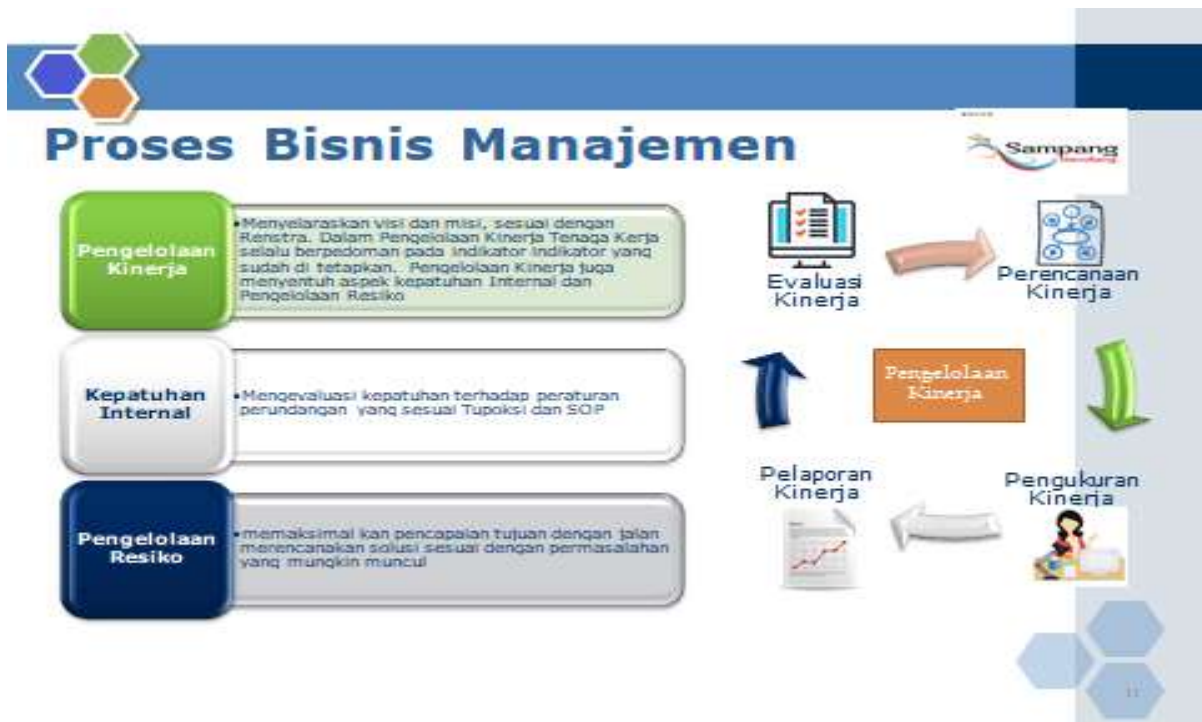
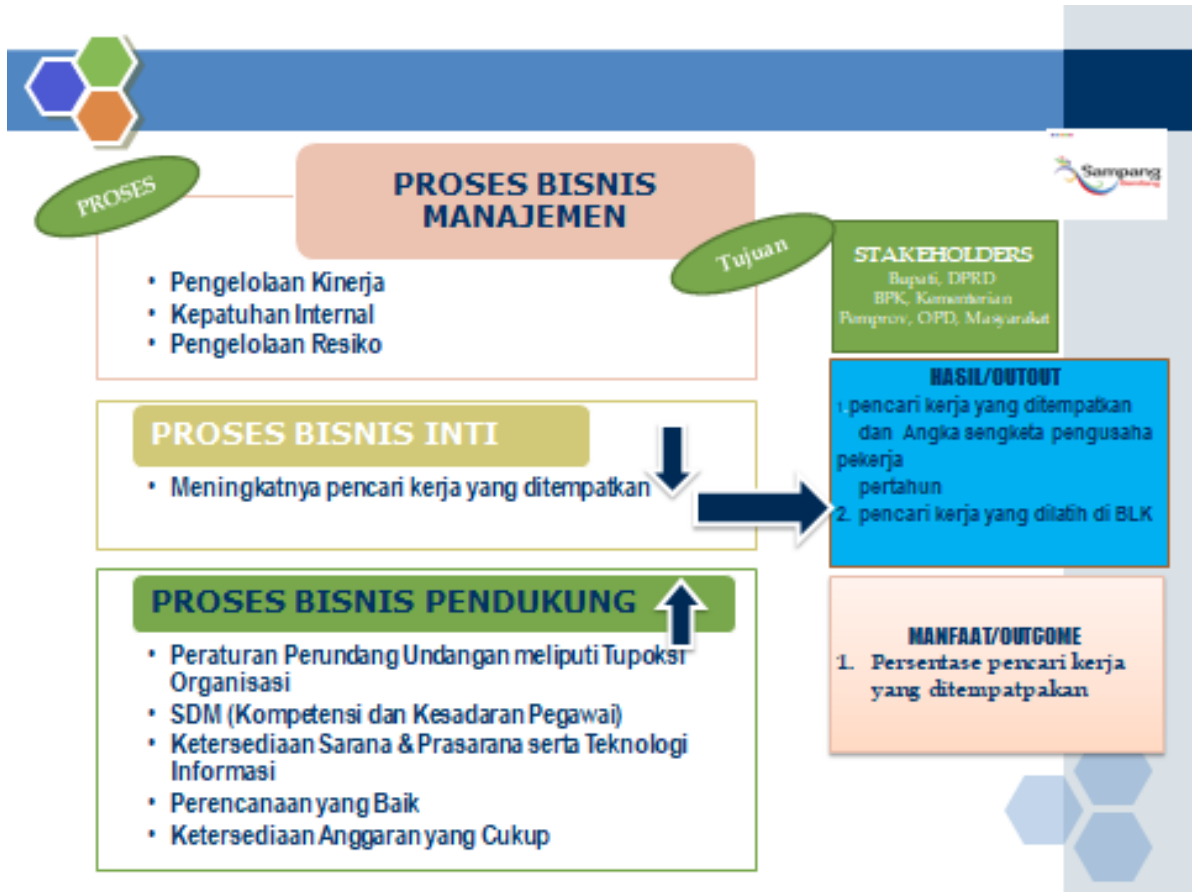
**MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI
DAERAH**

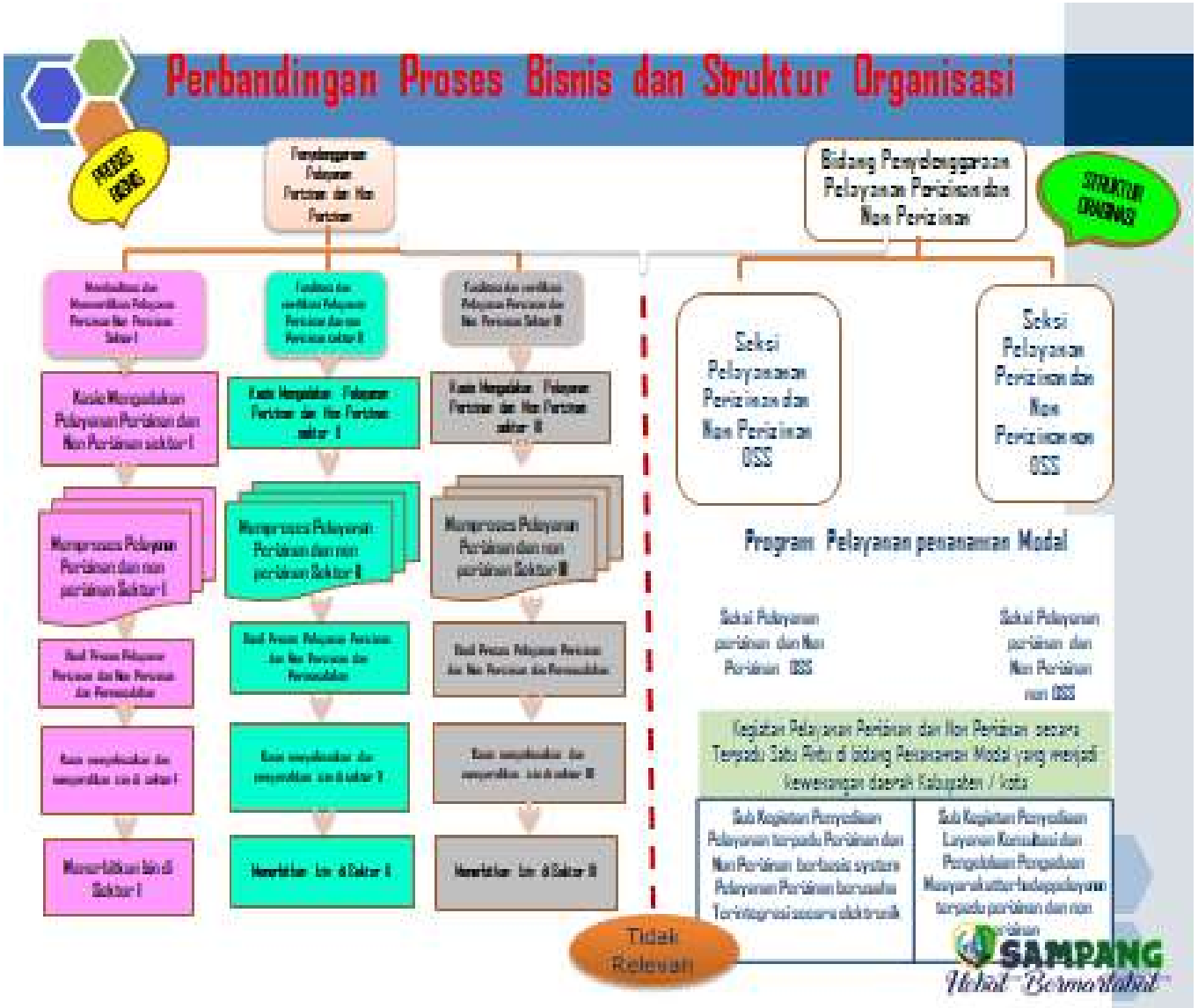
2

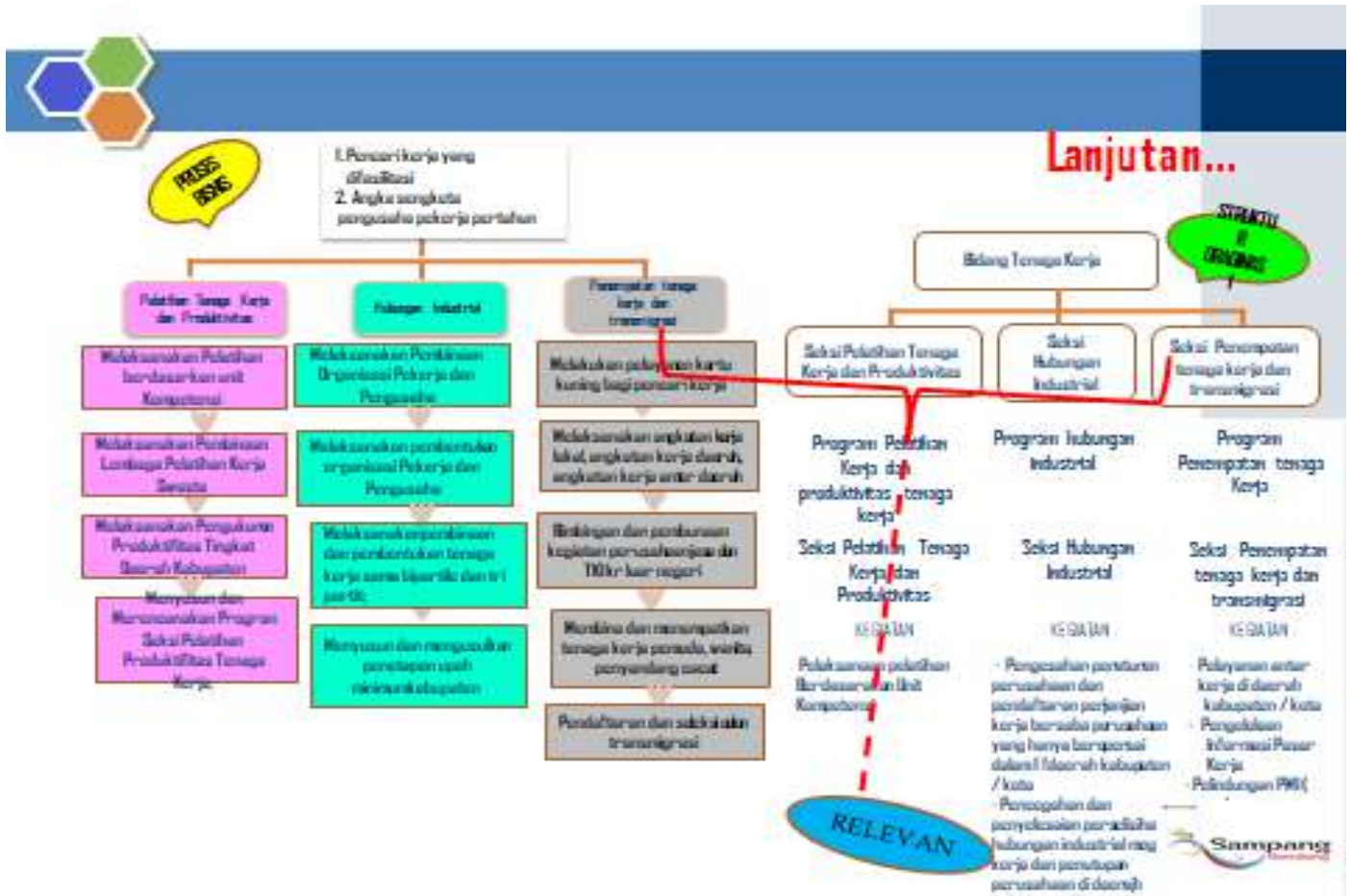
**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN
PERIZINAN**

3

**MENINGKATNYA PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA**







A. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 nomor : 065/450.7/434.100/2022 tanggal 02 Desember 2022, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah sesuai dengan ketentuan

B. Pengukuran Kinerja

B.II Kualitas Pengukuran

14) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi namun tidak berkelanjutan

B.III Implementasi Kinerja

18) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward and punishment

19) IKU belum direviu secara berkala

20) Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

C.II Penyajian Informasi Kinerja

9) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

D. Evaluasi Internal

D.II Kualitas Evaluasi

8) Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja

9) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

10) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode

D.III Kualitas Evaluasi

12) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

E. Pencapaian Sasaran

Capaian sasaran cukup baik

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kelemahan sehingga direkomendasikan agar dilakukan beberapa perbaikan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan kembali dengan mempertimbangkan *reward and punishment*

B. Pengukuran Kinerja

B.II Kualitas Pengukuran

14) Pengukuran kinerja ddikembangkan dengan menggunakan teknologi kinerja yang berkelanjutan dan dapat diukur secara maksimal

B.III Implementasi Kinerja

18) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas harus dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*

19) IKU harus direviu secara berkala

20) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi harus digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

C.II Penyajian Informasi Kinerja

9) Laporan kinerja kurang lengkap dalam menyajikan informasi analisis efisiensi namun perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen

D. Evaluasi Internal

D.II Kualitas Evaluasi

8) Pemantauan Rencana Aksi harus dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja

9) Pemantauan Rencana Aksi harus memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

10) Hasil evaluasi Rencana Aksi harus menunjukkan perbaikan setiap periode

D.III Kualitas Evaluasi

12) Informasi kinerja harus dapat digunakan seluruhnya dalam perbaikan perencanaan

E. Pencapaian Sasaran

Capaian kinerja ada perkembangan untuk lebih baik dari tahun sebelumnya

**BAB
II**

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

“Sampang Hebat Bermartabat”

DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah yang mendukung **Misi 2 dan Misi 4**, yaitu :

Misi 2 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif” .

Misi 4 :

“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”

Adapun tujuan dari **Misi 2** ini adalah **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pedesaan Melalui Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

Misi 4 Yaitu : **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik .**

Selanjutnya ditetapkan tujuan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang. yaitu :

1. **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**
2. **Meningkatkan Investasi Daerah**
3. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

dengan indikator kinerja tujuan adalah :

1. **Tingkat Pengangguran Terbuka**
2. **Persentase Kenaikan Realisasi Investasi**
3. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan
- b. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
- b. Nilai Realisasi Investasi
- c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tujuan:									
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,48	2,81	2,41	3,11	-	-
	Sasaran:									
	Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	94,66	95,73	56,91	75,9	-	-
2.	Tujuan:									
	Meningkatkan Investasi Daerah	2	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	13,80	9,7	-29,69	10,71	0,24	0,32

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang

TAHUN 2022

	Sasaran:									
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	385.29 7,435	422.58 3,748	297.51 3,257	329.378. 337.166	306.687,9 34	310.223,3 89
3	Tujuan:									
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99
	Sasaran:									
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93,01	93,13	93,16	93,24	93,50	93,75

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja Tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan di atas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2022:

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi	Juta Rp.	303.257,158	Sub Koordinator Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,35	SubKoordinator Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan Bidang Pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan
Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerjayang ditempatkan	%	95,26	Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2022

Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran
1. Persentase Pencari Kerja Yang dilatih Di BLK	68,75%	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3.016.473.284
2. Persentase pencari Kerja Yang difasilitasi	77,23%	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 161.301.584
3. Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100 %	Hubungan Industrial	Rp. 17.306.067
4. Jumlah Investor (PMDN / PMA)	2.700 investor	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 81.652.790
		Promosi Penanaman Modal	Rp. 137.589.771
5. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100 %	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 200.751.607
6. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %		Rp. 4.942.850
7. Nilai Investasi PMDN	745.128,403 (juta Rp.)	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 412.659.910
		Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 133.872.580

Untuk mewujudkan kinerja pada urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja , DPMPSTSP NAKER Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran murni dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **8.923.718.119** Adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2022 ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan yang cepat dan terukur, sehingga dilaksanakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi tersebut.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang

TAHUN 2022

Refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan kesehatan masyarakat serta pemulihan ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran yang kemudian disahkan melalui APBD Perubahan program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran DPMPSTP NAKER
Kab. Sampang Tahun 2022

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	APBD 2022 (DPA PD Th. 2022)			
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	Kab. Sampang	68,75%	3.016.473.398	DBHCHT
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	Kab. Sampang	68,75%	3.016.473.398	DBHCHT
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	Kab. Sampang	500 orang	3.016.473.398	DBHCHT
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	Jumlah Peralatan dan Sarana untuk Pelatihan di BLK yang dipelihara	Kab. Sampang	0	-	DBHCHT
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Kab. Sampang	77,23%	161.301.584	APBD
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Kab. Sampang	77,23%	37.910.000	APBD
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Sosialisasi bursa Tenaga Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	Kab. Sampang	0 orang	-	APBD
		Jumlah Perpindahan Masyarakat ke Daerah Transmigrasi (KK)		0 KK		
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Sosialisasi Bursa Tenaga kerja	Kab. Sampang	5 Kegiatan	37.910.000	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang

TAHUN 2022

2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Kab. Sampang	77,23%	54.422.784	APBD
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Job Fair	Kab. Sampang	1 kegiatan	54.422.784	APBD
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Kab. Sampang	77,23%	68.968.800	APBD
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	Kab. Sampang	100 Orang	68.968.800	APBD
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sengketa Pengusaha pekerja yang diselesaikan	Kab. Sampang	100%	17.306.067	APBD
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Pengusaha pekerja yang diselesaikan	Kab. Sampang	100%	17.306.067	APBD
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Kab. Sampang	150 Perusahaan	17.306.067	APBD
		Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten		14 Kecamatan		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Pengusaha pekerja yang diselesaikan	Kab. Sampang	100%	-	APBD
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	Kab. Sampang	0 Kasus	-	APBD
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang	100%	4.757.167.676	APBD
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang	100%	7.040.646	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang | **TAHUN 2022**

2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SOP)	Kab. Sampang	3 Dok	3.399.186	APBD
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dok	738.490	APBD
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dok	687.500	APBD
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dok	738.490	APBD
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dok	738.490	APBD
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	Kab. Sampang	5 Dok	738.490	APBD
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang	100%	3.666.190.108	APBD
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	Kab. Sampang	60 Orang	3.664.592.914	APBD
		Jumlah Kontrak Daerah yang dibayarkan		1 Ob		
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kab. Sampang	0 jenis	-	APBD
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang	1 Dok	759.589	APBD
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sampang	4 Dok	837.605	APBD
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Sampang	100%	1.182.903	APBD
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	Kab. Sampang	1 Dok	1.093.757	APBD
		Jumlah Dokumen RKPBM		0		
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	Kab. Sampang	4 Dok	89.146	APBD
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Kab. Sampang	0 Orang	11.922.000	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang | **TAHUN 2022**

2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sampang	0	-	APBD
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	Kab. Sampang	7 orang	11.922.000	APBD
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sampang	100%	192.782.207	APBD
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Kab. Sampang	15 Jenis	8.151.038	APBD
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Kab. Sampang	56 Jenis	17.226.612	APBD
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8 Unit		
		Jumlah Spanduk / Umbul - umbul/ Bendera yang diadakan		3 Jenis		
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan	Kab. Sampang	50 jenis	17.117.107	APBD
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Kab. Sampang	10 Jenis	15.784.450	APBD
		Jumlah belanja penggandaan yang disediakan		1 Jenis		
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kab. Sampang	2 Exlemplar	2.760.000	APBD
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Kab. Sampang	150 Ob	8.000.000	APBD
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	Kab. Sampang	50 Orang	123.743.000	APBD
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		300 kali		
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		450 Kali		
		Jumlah kebutuhan BBM		1000 Liter		
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Sampang	100%	112.785.057	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang

TAHUN 2022

2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sampang	63 unit	112.785.057	APBD
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun / di rehab	Kab. Sampang	1 unit	-	APBD
		Jumlah pagar kantor yang dibangun		0 Unit		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Sampang	100 %	480.962.500	APBD
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kab. Sampang	2250 surat	1.650.000	APBD
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Kab. Sampang	12 bulan	158.312.500	APBD
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	Kab. Sampang	26 ob	321.000.000	APBD
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Sampang	100 %	283.647.012	APBD
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Kab. Sampang	6 unit	63.063.800	APBD
		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan		13 unit		
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sampang	26 unit	23.500.000	APBD
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sampang	2 unit	197.083.212	APBD
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	Kab. Sampang	100 %	655.243	APBD
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Kab. Sampang	1 dok	655.243	APBD
		Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah		0 kali		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah potensi Investasi	Kab. Sampang	2 jenis	81.652.790	APBD
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peluang investasi	Kab. Sampang	2 Jenis	81.652.790	APBD
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah propektus kabupaten	Kab. Sampang	1 propektus	81.652.790	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang | **TAHUN 2022**

		Rapat -rapat perencanaan penanaman modal dan RKPPMD		2 kali		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	Kab. Sampang	4750 investor	137.589.771	APBD
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	Kab. Sampang	867 investor	137.589.771	APBD
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat Investor / Matchmaking	Kab. Sampang	1 matchmaking	137.589.771	APBD
		Jumlah Pameran Investasi yang di ikuti		2 kali		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Kab. Sampang	100 %	205.694.457	APBD
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Kab. Sampang	100 %	205.694.457	APBD
		Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu		100 %		APBD
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin OSS	Kab. Sampang	4200 izin	200.751.607	APBD
		Jumlah Izin Non OSS		2300 izin		APBD
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan SP, Maklumat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sampang	3 dokumen	4.942.850	APBD
		Jumlah Laporan Tindak Lanjut yang ditangani		10 laporan		
		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Perizinan dan Non Perizinan		5 kali		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	Kab. Sampang	180 pelaku usaha	412.659.910	APBD & DAK
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	Kab. Sampang	180 pelaku usaha	412.659.910	APBD & DAK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang | **TAHUN 2022**

2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan	Kab. Sampang	70 pelaku usaha	20.303.950	APBD & DAK
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Sampang	40 pelaku usaha	313.892.610	APBD & DAK
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan		2 kali		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Kab. Sampang	70 pelaku usaha	78.463.350	APBD & DAK
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN (Juta Rp.)	Kab. Sampang	654170,71	133.872.580	APBD
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMDN (Juta Rp.)	Kab. Sampang	654170,71	133.872.580	APBD
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengembangan sistem informasi penanaman modal	Kab. Sampang	1 paket aplikasi	133.872.580	APBD
		Jumlah pengolahan data penanaman modal		12 laporan		APBD
JUMLAH ANGGARAN					8.923.718.233	

Sumber : DPPA DPMPTSP NAKER Kab. Sampang TA. 2022

Sumber anggaran DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2022 seluruhnya dari DBHCHT , Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU).

**BAB
III**

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggung jawaban program / kegiatan menjadi bagian paling penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah di capai.

Sebagai bagian dari komitmen DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web–monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparandan berorientasi pada perbaikan pelayanan public.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah).

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya di atas 85% dari target.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021.

Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP NAKER

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	2022		
					Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,35%	3,08%	3,11%	99,03 %
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	297.513,257	303.257,158	329.378.337.166	108,61%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93,26	93,35	93,24	99,88%

Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi angkatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki target sebesar 3,08% dengan nilai realisasi 3,311% dengan besar capaian 99,03 %. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya Realisasi Investasi Daerah memiliki target 303.257,158 (Juta Rupiah) dengan nilai realisasi 329.378.337.166 juta rupiah dengan besar capaian 108,61 %, dimana capaian untuk tahun 2022 melebihi tahun sebelumnya. Untuk sasaran

strategis ketiga yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memenuhi targey yakni sebesar 99,88%. Pencapaian tersebut disebabkan karena tingkat pelayanan semakin membaik sehingga meningkatkan hasil survey masyarakat.

Dimana Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan masyarakat DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2022 sebagai berikut :

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI / JUMLAH
4	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?	120
4a	Apakah petugas menawarkan tambahan biaya di luar resmi (<i>pungli</i>) untuk mempercepat proses?	120
4b	Apakah masih terdapat praktek percaloan?	120
9	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	98
8	Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?	95
8e	Jam antri sesuai dengan zona atau tidak	95
6	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	93
7	Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	93
8b	Kamar mandi atau toilet bersih	92
9a	Sarana pengaduan (komplain) sudah memadai dan lengkap (Kotak saran dan pengaduan/SMS/Website) diakses	92
2	Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?	91
2a	Apakah petugas menawarkan jasa untuk mempercepat proses perijinan?	91
8a	Ruang pelayanan bersih, rapi dan nyaman	91
1	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan standar pelayanannya/ jenis pelayanannya?	90
1a	Apakah persyaratan pelayanan tertulis dengan jelas, detail, dan lengkap (semua syarat sudah tertulis jelas, tidak ada syarat yang belum	84

	di informasikan)	
3b	Apakah jam buka pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?	90
8c	Tempat parkir cukup luas, nyaman dan aman	90
8d	Pelayanan tidak perlu antri yang lama dan membosankan	90
5	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	89
9b	Pengaduan (komplain) sudah ditindaklanjuti (diselesaikan) oleh unit pelayanan.	89
3	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	87
3a	Apakah proses penyelesaian pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?	87
6a	Petugas menjawab pertanyaan/keluhan kita dengan cepat, tepat, dan lengkap	86
7a	Petugas sopan, ramah, dan sabar dalam menjawab pertanyaan	86

Secara keseluruhan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan perijinan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal adalah 93,24 (Kategori Sangat Baik) berada pada rentang nilai 88,31 – 100 sehingga nilai SKM untuk Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tergolong sangat baik.

Nilai kepuasan tertinggi adalah untuk unsur Maklumat Pelayanan dalam kategori **Biaya / Tarif** (120) dan nilai kepuasan terendah adalah Petugas sopan, ramah, dan sabar dalam menjawab pertanyaan (86). Biaya / Tarif memperoleh penilaian kepuasan tertinggi karena masyarakat pengguna jasa merasa bahwa tidak ada Biaya yang dikenakan ketika mengurus ijin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.

Hasil ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat pengguna jasa yang menyatakan bahwa kapasitas DPMPSTP Dan TENAGA KERJA dalam

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penanaman modal terhadap masyarakat dirasakan sudah cukup memadai.

Tabel. 3.2 Capaian kinerja sasaran strategis selama tahun ini, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	
						Target	Realisasi
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,41%	3,35%	3,08%	3,11%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	297.115,146	297.513,257	303.257,158	329.378.337.166
3	Meningkatkan Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93,16	93,26	93,35	93,24

Keterangan :

1. Indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** dari target 3,08 % dengan Realisasi 3,11 % mencapai target yakni 99,03% dengan penghitungan

Jumlah Pengangguran	3,08	x 100 %	
Jumlah Angkatan Kerja	x		
100 %	3,11		

peyebab tidak tercapainya target tersebut dikarenakan banyaknya Perusahaan perusahaan yang mengurangi pekerja di kabupaten sampang sehingga berpegaruh kepada Jumlah Pengangguran dan Angkatan kerja akibat Covid 19.

2. Indikator Nilai Realisasi Investasi dari target 303.257,158 dengan Realisasi 329.378.337.166 telah mencapai target 108,61% disebabkan adanya Kegiatan Fasilitas Penanaman Modal meliputi diadakannya Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM dan pendampingan penyampaian LKPM melalui OSS RBA baik pelaku usaha UMK dan Non UMK selain itu juga disebabkan adanya kegiatan Pengawasan / Inspeksi lapangan guna mendata realisasi tiap - tiap proyek yang ada di Kabupaten Sampang secara Online maupun. bisa di lihat pada tabel berikut :

Table 3.3 Capaian kinerja dan Target lima tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
				2019	2020	2021	2022		2023	2024
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,81%	2,41%	3,35%	3,08%	3,11%	2,78%	2,35%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	422.583 .748.15 2	297.11 5,146	297.51 3,257	303.257, 158	329.378 .337.16 6	306.687 ,934	310.22 3,389
3	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93,13	93,16	93,26	93,35	93,24	93,50	93,75

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang akan mengemukakan permasalahan serta penyebab keberhasilan/ kegagalan sebagaimana table berikut.

Tabel 3.4
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP NAKER	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	Kurangnya Pembukaan Lowongan Pekerjaan	Kinerja Pengangguran yang Masih kurang paham dengan pekerjaan yang sudah disediakan	Terdapat Pelatihan di BLK dengan menggunakan Media social yang sudah terupdate setiap hari.
2	Meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian penanaman modal	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perizinan investasi (izin prinsip) dengan realisasi	Terdapat wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif
3	Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip	Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya	Belum terdapat Prospektus secara riil yang menjadi dasar promosi investasi di Kabupaten Sampang	Terdapat sejumlah UMKM yang telah berfasilitasi dalam kerja sama dengan perusahaan skala besar

		Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di tingkat Kabupaten Sampang		Terdapat peta potensi investasi di Kabupaten Sampang
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Telah berjalannya UPTSA dan PTSP dalam penanganan pengurusan Izin penanaman modal Proses perizinan investasi yang mudah dan cepat

Dalam pemenuhan target indikator kinerja utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan target yang telah ditentukan menjadi tidak tercapai. Pada tahun 2022 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kefalidan pendataan pada penghitungan realisasi investasi belum maksimal dikarenakan terhentinya sementara aplikasi SPIPISE pada saat awal berjalannya Online Single Submission (OSS);
- b. Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi untuk mencatat realisasi penanaman modal karena faktor keterbatasan anggaran sehingga belum dapat mem backup seluruh pengusaha yang wajib menjadi sasaran money;

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah:

- a. Pro aktif berkoordinasi dengan pusat dan provinsi terkait pengaktifan kembali aplikasi SPIP sebagai sumber data dan laporan realisasi penanaman modal;

- b. Melakukan pengklasifikasian sasaran monev agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk pengusaha wajib monev;
 - c. Inovasi dan pengembangan-pengembangan pada program kegiatan yang berpengaruh besar terhadap stimulant minat investor untuk menanamkan investasi usaha di Kabupaten Sampang melalui perizinan.
1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel dibawah ini.

Tabel. 3.5
Tabel Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.314.923.032	72,45%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	676.480.625	88,34%
3	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	189.629.410	92,19%

Tabel. 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,08%	3,11%	99,03 %	3.195.080.935	2.314.923.032	72,45%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	303.257,158	329.378.337.166	108,61%	765.775.051	676.480.625	88,34%
3	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,35	93,24	99,88%	205.694.457	189.629.410	92,19%

Tabel. 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	99,03 %	72,45%	1,37 %
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	108,61%	88,34%	1,23 %
3	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,88%	92,19%	1,08 %

Dari table efisiensi penggunaan sumber daya di atas dapat di Analisa bahwa dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian Indikator Kinerja utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang baik, namun serapan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak bias total terserap, namun kegiatan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian IKU OPD, sehingga hanya berpengaruh terhadap serapan anggaran saja.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Secara umum program/kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Namun demikian program/kegiatan tersebut akan dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang juga mengacu pada kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana kebijakan tersebut sulit diprediksi pada awal-awal tahun.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang pada Tahun 2022 melaksanakan 9 (Sembilan) program yang terurai dalam 19 kegiatan. Adapun Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara rinci diuraikan sebagai berikut;

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan capaian kinerja 72,24 % dikarenakan Banyak Pelatihan yang jangka waktunya lebih dari satu bulan, sedangkan waktu dan Narasumber / pelatihnya terbatas. dan juga dikarenakan ada penambahan PAK yang cukup besar di Akhir Tahun.

- 1) Program Penempatan Tenaga Kerja Aparatur melalui Kegiatan Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota , Pengelola Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 74,93% (sesuai target yang direncanakan)
- 2) Program hubungan industrial melalui kegiatan Pengesahan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 86,11% (sesuai target yang direncanakan).
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penataan Organisasi dengan target kinerja dan capaian kinerja sebesar 100% (sesuai target yang direncanakan)
- 4) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota , target kinerja 2 jenis layanan dengan capaian kinerja 2 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan)
- 5) Program promosi penanaman modal, melalui kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan target 2700 investor dan capaian kinerja 4981 Investor (melebihi target yang direncanakan)
- 6) Program Pelayanan penanaman modal, melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu dibidang Penanaman

Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target dan capaian kinerja sebesar 100% (sesuai target yang direncanakan)

- 7) Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota target kinerja 180 pelaku usaha dengan capaian kinerja 200 pelaku usaha (belum sesuai target yang direncanakan)
- 8) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota target kinerja 745.128.403.000 juta dengan capaian kinerja 1.327.773.090.799 juta (melebihi target yang direncanakan)

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2021, total anggaran belanja Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **8.923.718.119** Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.3.664.592.914 dan belanja langsung sebesar Rp. 5.259.125.205. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja gaji pegawai. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2022 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.664.592.914	3.327.681.546	90,81
Belanja Langsung	5.259.125.205	4.252.900.439	80,86
Total	8.923.718.119	7.580.581.985	84,95

Realisasi Anggaran merupakan realisasi yang telah digunakan dalam satu tahun anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing–masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat Capaian kinerja masing–masing indikator tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi tahun 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	3,35%	3,08%	3,11%	99,03 %
2	Meningkatnya Realisasi Investasi <i>Daerah</i>	297.513,257	303.257,158	329.378.337.166	108,61%
3	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	93,26	93,35	93,24	99,88%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | TAHUN 2022
(LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang

Capaian sasaran melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Pelaksanaan indikator Tujuan sasaran Program Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	2022			
				Target	Anggaran	Realisasi Target	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	68,75%	3.016.473.284	72,59%	2.179.158.883
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	77,23%	161.301.584	66,41%	120.861.149
		Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100%	17.306.067	100%	14.903.000
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	'Jumlah potensi Investasi	2 Jenis	81.652.790	2 Jenis	78.032.681
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	2700 Investor	137.589.771	4.981 Investor	132.175.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	180 Pelaku Usaha	412.659.910	162 Pelaku Usaha	333.881.000
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	745.128.403.000 (Juta Rp.)	133.872.580	1.327.773.090.799 (Juta Rp.)	132.391.944
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100%	200.751.607	100%	187.763.300
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	4.942.850	100%	1.866.110

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi nya sudah mencapai target. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pelayanan untuk menambah minat investor agar mau berinvestasi di Kab. Sampang.

Tabel 3.10
Efisiensi Anggaran Belanja Per Sasaran Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	66,41%	72,24	0,91
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	100%	74,93	27,76
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	100	86,61	13,39
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah potensi Investasi	108	95,57	12,43
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	92,20	96,06	3,86
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	108	80,91	27,09
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	100%	98,89	1,11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100%	93,53	6,47
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	66,41%	37,75	28,66

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
	Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan kembali dengan mempertimbangkan <i>reward and punishment</i>	Reward dan punishment telah diterapkan (Reward : Penghargaan ASN DPMPSTP NAKER ; punishment : Potongan TPP)
B.	Pengukuran Kinerja	
II.	Kualitas Pengukuran	
	Pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi kinerja yang berkelanjutan dan dapat diukur secara maksimal	Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan dapat diukur secara maksimal
III.	Implementasi Kinerja	
	Dokumen Renstra telah di Review secara berkala	Melakukan Review kepada Dinas terkait atau Penanggung Jawab.
	IKU harus direviu secara berkala	Melakukan reviu IKU pada P-Renstra DPMPSTP NAKER Kab. Sampang Tahun 2019-2024
	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi harus digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Telah dilakukan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi yang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berjenjang.
C.	Pelaporan Kinerja	
II.	Penyajian Laporan Kinerja	
	Laporan kinerja kurang lengkap dalam menyajikan informasi analisis efisiensi namun perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen	Laporan kinerja telah menyajikan informasi analisis efisiensi dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai
D.	Evaluasi Internal	
II.	Kualitas Evaluasi	
	Pemantauan Rencana Aksi harus dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti

	Pemantauan Rencana Aksi harus memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode
	Hasil evaluasi Rencana Aksi harus menunjukkan perbaikan setiap periode	
III.	Kualitas Evaluasi	
	Informasi kinerja harus dapat digunakan seluruhnya dalam perbaikan perencanaan	Informasi kinerja telah digunakan untuk penyusunan review/perubahan Renstra BKPSDM dan penyusunan anggaran
E.	Pencapaian Sasaran	
	Capaian kinerja ada perkembangan untuk lebih baik dari tahun sebelumnya	Capaian kinerja telah menunjukkan perkembangan lebih baik dari tahun sebelumnya.

**BAB
IV** **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang menjadi punya makna strategis, sebagian bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, dalam masa – masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggung jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang baik terhadap Gubernur maupun kepada seluruh masyarakat kabupaten Sampang.

Pengukuran – pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga mulai tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, Nampak bahwa kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja Tahun 2022, yang mencakup juga penentuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program / kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu fokus perbaikan kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang ke depan. Untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait antara lain dalam bentuk:

1. Adanya Dukungan dari Badan Legislatif agar program dan sasaran yang dibebankan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang dapat terselenggaranya dengan baik dan mencapai target.
2. Koordinasi Teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan perijinan dan penanaman modal dan dunia usaha.
3. Menampung masukan / aspirasi dan kritikan dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya good governance.
4. Peningkatan Sumber daya aparatur bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal melalui pendidikan dan pelatihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengusulkan anggaran pada program kegiatan kajian investasi terhadap unggulan daerah.
6. Membuat kajian terhadap potensi investasi unggulan yang siap ditawarkan kepada investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Sampang.

Dalam penyusunan (LKjIP) dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang masih jauh dari sempurna, sehingga di perlukan adanya saran dan masukan dari semua pihak yang terkait guna terwujudnya penyusunan (LKjIP) yang lebih sempurna.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2022, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.